

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR ... TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENATAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KAMPAR,**

Menimbang :	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sesuai prinsip demokrasi ekonomi merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat;</li><li>b. bahwa Pasar Rakyat perlu dipertahankan eksistensinya dan diberdayakan sehingga berkembang dapat secara serasi di tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;</li><li>c. bahwa perlu adanya kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai bagian dari persaingan usaha yang sehat;</li><li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Peraturan Daerah;</li></ul>
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023</li></ul>

	<p>Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);</p> <p>7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAMPAR dan BUPATI KAMPAR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.</li> </ol>

	<p>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Kampar.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.</p> <p>7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.</p> <p>8. Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penekat, atap, pintu dengan bentuk apapun yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berjualan.</p> <p>9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berasas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan.</p> <p>10. Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.</p> <p>12. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk <i>minimarket</i>, <i>supermarket</i>, <i>department store</i>, <i>hypermarket</i>, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.</p> <p>13. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar</p>
--	--

	<p>Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.</p> <p>14. Pengendalian adalah pemantauan kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengkoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.</p> <p>15. Rencana Tata Ruang dan Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.</p> <p>16. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.</p> <p>17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>18. Koperasi adalah badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.</p> <p>19. Tempat Dasaran adalah tempat di Pasar Rakyat untuk berdagang/berjualan dengan cara menggelar barang dagangannya di atas permukaan tanah/lahan dengan atau tanpa menggunakan alas.</p> <p>20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan.</p> <p>21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>23. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang</p>
--	---

	<p>menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.</p> <p>25. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.</p> <p>26. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b>  <b>ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN</b>  <b>Pasal 2</b></p> <p>Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. adil dan sehat;</li> <li>c. keamanan berusaha;</li> <li>d. kemandirian;</li> <li>e. kemitraan;</li> <li>f. kesederhanaan;</li> <li>g. kebersamaan; dan</li> <li>h. berwawasan lingkungan.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk memberikan penataan, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Penyelenggaraan Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;</li> <li>b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;</li> <li>c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;</li> <li>d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan</li> <li>e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b>  <b>RUANG LINGKUP</b>  <b>Pasal 5</b></p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;</li> </ul>

	<p>b. penatakelolaan Pasar Daerah;  c. penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;  d. Kemitraan usaha;  e. pembinaan dan pengawasan; dan  f. kewajiban dan larangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b>  <b>PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN</b>  <b>PASAR RAKYAT</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Jenis Pasar Rakyat</b>  <b>Paragraf 1</b>  <b>Umum</b>  <b>Pasal 6</b></p> <p>Jenis Pasar Rakyat meliputi:</p> <p>a. Toko/Kios;  b. Los; dan/atau  c. tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, Koperasi, dan UMKM.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha di dalamnya.  (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;</li> <li>b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;</li> <li>c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;</li> <li>d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat; dan</li> <li>e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  (2) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;</li> <li>b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;</li> <li>c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pasar Rakyat;</li> </ul>

	<p>d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang Pasar Rakyat;</p> <p>e. melakukan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat;</p> <p>f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;</p> <p>g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat; dan</p> <p>h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Pengelolaan Pasar Rakyat Paragraf 1 Pendirian Pasar Rakyat Pasal 9</b></p> <p>Pengelolaan dan pemberdayaan pasar bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman, tertib, adil, dan berdaya saing.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR.</p> <p>(2) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;</li> <li>2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;</li> <li>3. kepadatan penduduk;</li> <li>4. pertumbuhan penduduk;</li> <li>5. Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;</li> <li>6. penyerapan tenaga kerja lokal;</li> <li>7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal; dan</li> <li>8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.</li> </ul> </li> <li>b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;</li> <li>c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.</li> </ul> <p>(3) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Perangkat Daerah yang diantara tugas</p>

	<p>pokok dan fungsinya membidangi urusan pajak dan retribusi daerah dan/atau pihak lain.</p> <p>(4) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan/perumahan di Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b>  <b>Perizinan Pasar Rakyat</b>  <b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2R.</p> <p>(2) IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2R kepada Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perizinan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) IUP2R dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.</p> <p>(2) IUP2R sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Setiap pemegang IUP2R wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:</p> <p>a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi dan tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah gerai yang dimiliki;</li> <li>2. omset penjualan seluruh gerai;</li> <li>3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan</li> <li>4. jumlah tenaga kerja yang terserap.</li> </ol> <p>b. setiap perubahan yang terkait dengan pengelolaan Pasar Rakyat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b>  <b>Pemberdayaan Pasar Rakyat</b>  <b>Paragraf 1</b>  <b>Pemberdayaan Pedagang</b>  <b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat.</p> <p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;</li> <li>b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta</li> </ol>

	<p>pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat;</li> <li>d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;</li> <li>e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat; dan</li> <li>f. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b> <b>Pengembangan Iklim Usaha</b> <b>Pasal 15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.</li> <li>(2) Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.</li> <li>(3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendanaan;</li> <li>b. sarana dan prasarana;</li> <li>c. kemitraan;</li> <li>d. perizinan usaha; dan</li> <li>e. kesempatan berusaha.</li> </ul> </li> <li>(4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sumber daya manusia;</li> <li>b. produksi dan pengolahan; dan</li> <li>c. pemasaran.</li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan</b> <b>Pasal 16</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.</li> <li>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Rakyat.</li> <li>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PENATAKELOLAAN PASAR DAERAH</b> Bagian Kesatu Penataan Pasar Daerah Paragraf 1</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Umum</b> <b>Pasal 18</b></p> <p>Pasar Daerah dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pasar umum;</li> <li>b. pasar khusus; dan/atau</li> <li>c. pasar grosir.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Klasifikasi Pasar Daerah terdiri atas pasar kelas I, pasar kelas II, pasar kelas III, dan/atau pasar Kelas IV.</p> <p>(2) Klasifikasi Pasar Daerah ditentukan berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan rata-rata setiap bulan; dan/atau</li> <li>b. waktu buka dan tutup.</li> </ul> <p>(3) Bupati menetapkan klasifikasi Pasar Daerah kedalam Kelas I, II, III dan IV berdasarkan kriteria pasar.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Klasifikasi Toko dan Los terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Toko, Kios dan Los kelas I;</li> <li>b. Toko, Kios dan Los kelas II;</li> <li>c. Toko, Kios dan Los kelas III; dan/atau</li> <li>d. Toko, Kios dan Los kelas IV.</li> </ul> <p>(2) Klasifikasi Toko, Kios dan Los sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada jenis dagangan.</p> <p>(3) Bupati menetapkan suatu Toko, Kios dan Los ke dalam klasifikasi kelas I, kelas II, kelas III dan/atau kelas IV berdasarkan kriteria Toko, Kios dan Los.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Pembangunan Pasar Daerah</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Kebijakan pembangunan Pasar Daerah ditetapkan melalui keputusan Bupati.</p> <p>(2) Pembangunan Pasar Daerah meliputi pembangunan baru, pengembangan, dan/atau pembangunan kembali atau renovasi.</p> <p>(3) Pembangunan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna dan/atau calon pengguna.</p> <p>(4) Pembangunan kembali atau renovasi Pasar Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan atau disosialisasikan dengan para pengguna.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Pendanaan pembangunan Pasar Daerah bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) provinsi;</li> <li>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>d. pengguna; dan/atau</li> <li>e. calon pengguna.</li> </ul> <p>(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari 1 (satu) sumber atau lebih.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b>  <b>Penyelenggaraan Pasar Daerah</b>  <b>Pasal 23</b></p> <p>Pemerintah Daerah dapat menetapkan diadakannya pasar pagi, pasar sore atau pasar malam untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>Pengelola Pasar Daerah menyediakan tempat khusus parkir dalam penyelenggaraan Pasar Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Setiap pedagang yang telah memenuhi persyaratan, berhak menggunakan unit Toko, Kios, Los, atau Tempat Dasaran di Pasar Daerah.  (2) Apabila terdapat 1 (satu) unit Toko, Kios, Los atau 1 (satu) Tempat Dasaran dikehendaki oleh lebih dari 1 (satu) peminat, maka diadakan undian.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat</b>  <b>Pelayanan Pasar Daerah</b>  <b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Pelayanan Pasar Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan keamanan dan kenyamanan;</li> <li>b. pelayanan persampahan atau kebersihan;</li> <li>c. pelayanan pemakaian kekayaan daerah;</li> <li>d. pelayanan pasar grosir dan/atau Pertokoan;</li> <li>e. pelayanan tempat khusus parkir; dan</li> <li>f. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah .</li> </ul> <p>(2) Pelayanan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pedagang dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan penyediaan fasilitas Kios;</li> <li>b. pelayanan penyediaan fasilitas Los;</li> <li>c. pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Dasaran; dan</li> <li>d. pelayanan penyediaan fasilitas pelataran.</li> </ul> <p>(3) Terhadap pelayanan Pasar Daerah yang diberikan kepada pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Setiap penggunaan Toko, Kios, Los dan Tempat Dasaran wajib mempunyai izin.  (2) Wajib mempunyai izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap pedagang dengan perjanjian sewa kontrak yang batas waktu penggunaannya ditentukan sampai batas masa berlaku sewa kontrak dimaksud.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat</b>  <b>Hak Guna</b>  <b>Pasal 28</b></p>

	<p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hak guna kepada pengguna dan/atau calon pengguna Pasar Daerah.</p> <p>(2) Pemberian hak guna sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hak penggunaan toko;</li> <li>b. hak penggunaan Kios;</li> <li>c. hak penggunaan los; dan/atau</li> <li>d. hak penggunaan tempat dasaran.</li> </ul> <p>(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak guna kepada Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perdagangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Untuk memperoleh hak guna pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.</p> <p>(2) Hak guna diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindah tanggalkan atau dialihkan dengan persetujuan Bupati.</p> <p>(3) Hak guna diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis namun hak guna belum dikeluarkan atau tidak ditanggapi, maka permohonan hak guna dianggap disetujui dan hak guna segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.</p> <p>(5) Permohonan hak guna tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(6) Penolakan permohonan hak guna dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>Permohonan pembaruan hak guna diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhinya hak guna.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Hak guna dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperbarui;</li> <li>b. dikembalikan oleh pemegang hak guna;</li> <li>c. pemilik hak guna meninggal dunia; dan/atau</li> <li>d. dicabut oleh Bupati.</li> </ul> <p>(2) Pemilik hak guna yang telah dinyatakan hak gunanya tidak berlaku harus mengembalikan Toko, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasaran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.</p> <p>(3) Pengembalian Toko, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikembalikan dalam keadaan kosong paling lambat 14</p>

	<p>(empat belas) hari sejak hak guna dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(4) Bupati dapat mengosongkan secara paksa Toko, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasaran yang tidak dikembalikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (3).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Ahli waris dari pemilik hak guna yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c harus memberitahukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan berkenaan meninggal dunianya pemilik hak guna.</p> <p>(2) Pemberitahuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan sejak pemilik hak guna meninggal dunia.</p> <p>(3) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab ahli waris.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Badan hukum pemilik hak guna yang tidak melakukan kegiatan lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tidak melakukan kegiatan, penanggung jawab badan hukum bersangkutan harus memberitahukan dan mengembalikan hak guna kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penatakelolaan termasuk dan tak terbatas pada hak, kewajiban, dan larangan berkenaan pengelolaan Pasar Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENATAAN DAN PENGENDALIAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b></p> <p style="text-align: center;">Penataan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertokoan;</li> <li>b. mal; dan</li> <li>c. plaza</li> </ul> <p>(2) Toko Swalayan dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. minimarket;</li> <li>b. supermarket;</li> <li>c. <i>department store</i>;</li> <li>d. <i>hypermarket</i>; dan</li> <li>e. perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);</li> <li>b. supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);</li> <li>c. <i>department store</i>, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);</li> <li>d. <i>hypermarket</i>, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan</li> <li>e. perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 37</b></p> <p>Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. minimarket, supermarket, dan <i>hypermarket</i> menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;</li> <li>b. <i>department store</i> menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan</li> <li>c. perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 38</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada RTRW dan/atau RDTR termasuk peraturan zonasinya.</li> <li>(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;</li> <li>2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;</li> <li>3. kepadatan penduduk;</li> <li>4. pertumbuhan penduduk;</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>5. kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;</p> <p>6. penyerapan tenaga kerja lokal;</p> <p>7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagaisarana bagi Koperasi dan UMKM lokal;</p> <p>8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;</p> <p>9. prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan</p> <p>10. tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain; dan</p> <p>c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.</p> <p>(3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan atau lembaga independen yang berkompeten.</p> <p>(4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:</p> <p>a. Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan; atau</p> <p>b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.</p> <p>(5) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.</p> <p>(6) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi minimarket.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Modal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersumber dari penanaman modal dalam negeri.</p>

	<p>(2) Modal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga dapat bersumber dari penanaman modal asing.</p> <p>(3) Modal asing sebagaimana dimaksud ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 40</b></p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP.</p> <p>(2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.</p> <p>(3) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP dan/atau IUTS kepada Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perizinan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Permohonan IUPP dan/atau IUTS dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.</p> <p>(2) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTS bagi minimarket.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 42</b></p> <p>(1) IUPP dan/atau IUTS dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.</p> <p>(2) IUPP dan/atau IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) IUPP dan/atau IUTS tidak dapat dipindah tanggalkan kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Apabila terdapat perubahan lokasi kegiatan usaha, pemilik/penanggung jawab dan/atau jenis kegiatan usaha, maka pemilik usaha harus mengajukan izin baru.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menghentikan diterbitkannya IUPP dan/atau IUTS.</p>

	<p>(2) Pembatasan dan/atau penghentian diterbitkannya IUPP dan/atau IUTS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko eceran tradisional, dan/atau UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;</li> <li>b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat, Toko eceran tradisional, dan/atau UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> <p>Pusat Perbelanjaan yang tidak memiliki IUPP dan Toko Swalayan yang tidak memiliki IUTS namun sudah beroperasi dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. pembekuan operasional sementara;</li> <li>c. penyegelan tempat usaha;</li> <li>d. pencabutan izin usaha; dan/atau</li> <li>e. penutupan tempat usaha.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengendalian Paragraf 1 Zonasi dan Jarak <b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepadatan penduduk;</li> <li>b. perkembangan pemukiman baru;</li> <li>c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;</li> <li>d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan</li> <li>e. keberadaan Pasar Rakyat, warung, dan/atau Toko eceran tradisional di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket.</li> </ul> <p>(2) Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, warung, dan/atau Toko eceran tradisional di wilayah sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat dan/atau UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang; dan</li> <li>b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, warung, dan/atau Toko eceran tradisional.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 46</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan</p>

	<p>mengenai jarak antartempat usaha perdagangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendirian dan/atau lokasi Toko Swalayan minimal berjarak 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat dan/atau Toko eceran tradisional;</li> <li>b. Toko Swalayan yang beroperasi di depan atau di dekat pasar rakyat sebelum berlakunya peraturan ini wajib difungsikan sebagai toko grosir;</li> <li>c. Toko Swalayan yang berstatus Waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh saling mengampit;</li> <li>d. jarak antara toko Swalayan dengan merek yang sama berjarak minimal 500 m (lima ratus meter).</li> <li>e. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dari Pusat Perbelanjaan lainnya;</li> </ul> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan arteri sekunder atau jalan kolektor primer.</li> <li>b. <i>hypermarket</i> dan Pusat Perbelanjaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer; dan</li> <li>2. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.</li> </ul> </li> <li>c. supermarket dan <i>department store</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tidak berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan</li> <li>2. tidak berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.</li> </ul> </li> <li>d. minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan dan/atau perumahan di dalam kota.</li> </ul> <p>(2) Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan dan/atau perumahan maksimal 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk Toko Swalayan yang didirikan Koperasi.</p> <p>(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> </ul>

	<p>b. pembekuan operasional sementara;  c. penyegelan tempat usaha;  d. pencabutan izin usaha; dan/atau  e. penutupan tempat usaha.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b>  <b>Jam Operasional</b>  <b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:  a. untuk hari senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan  b. untuk hari Sabtu dan Ahad pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.</p> <p>(2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan operasional kegiatan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin tertulis dari kepala yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi perdagangan.</p> <p>(3) Toko Swalayan yang akan melaksanakan waktu operasional 24 (dua puluh empat) jam wajib memperoleh izin operasional dari kepala Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perdagangan.</p> <p>(4) Izin operasional 24 (dua puluh empat) jam dapat diberikan untuk minimarket, minimarket Waralaba dan minimarket cabang dengan kriteria:  a. lokasi minimarket di dalam pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan  b. lokasi minimarket berada dalam jarak 500 m (lima ratus meter) dari pusat layanan jasa antara lain berupa perguruan tinggi, rumah sakit dan pusat perbelanjaan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b>  <b>Pelaporan Kegiatan Usaha</b>  <b>Pasal 49</b></p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:  a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:  1. jumlah gerai yang dimiliki;  2. omset penjualan seluruh gerai;  3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan  4. jumlah tenaga kerja yang terserap.  b. setiap perubahan yang terkait dengan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.</p> <p>(2) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan pemegang IUTS wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:  a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:</p>

	<p>1. jumlah gerai yang dimiliki;</p> <p>2. omset penjualan seluruh gerai;</p> <p>3. jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan</p> <p>4. jumlah tenaga kerja yang terserap.</p> <p>b. setiap perubahan yang terkait dengan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 50</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penataaan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b>  <b>KEMITRAAN USAHA</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Bentuk Kerja Sama</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 51</b></p> <p>(1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.</p> <p>(2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kerja sama pemasaran;</li> <li>b. kerja sama penyediaan lokasi usaha; dan/atau</li> <li>c. kerja sama penerimaan pasokan.</li> </ul> <p>(3) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang diantara tugas dan fungsinya membidangi perdagangan.</p> <p>(4) Pendaftaran Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh penerima Waralaba dan/atau penerima Waralaba lanjutan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Kerja sama Kemitraan dalam pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. subjek perjanjian;</li> <li>b. objek perjanjian;</li> <li>c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan</li> <li>d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.</li> </ul> <p>(3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b>  <b>Kerja Sama Pemasaran</b>  <b>Pasal 53</b></p> <p>(1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (<i>repackaging</i>) dengan merk pemilik barang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau</li> <li>b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</li> </ul> <p>(2) Pemasok dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.</p> <p>(3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.</p> <p>(4) Penggunaan merk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b>  <b>Kerja Sama Penyediaan Lokasi Usaha</b>  <b>Pasal 54</b></p> <p>(1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagai lokasi usaha untuk Koperasi dan UMKM dalam rangka kemitraan usaha.</p> <p>(2) Koperasi dan UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat</b>  <b>Kerja Sama Penerimaan Pasokan Barang</b>  <b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Koperasi dan UMKM kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</p>

	<p>dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.</p> <p>(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemasok barang termasuk kriteria Koperasi dan UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (<i>listing fee</i>) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok.</p> <p>(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b>  <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>          Bagian Kesatu          Pembinaan          Paragraf 1          Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko          Swalayan          Pasal 58</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan; dan</li> <li>b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b>  <b>Pengawasan</b>  <b>Paragraf 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 59</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkala atau rutin; dan</li> <li>b. pengawasan khusus atau insidentil.</li> </ul> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>(4) Pelaksanaan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengaduan masyarakat;</li> <li>b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau</li> <li>c. informasi perdagangan.</li> </ul> <p>(5) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada DPRD selambatnya 2 (dua) bulan sejak kegiatan pengawasan dilakukan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> <p>(1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi sebagai bagian dari kegiatan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang tidak memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan lisan dan/atau tertulis;</li> <li>b. pembekuan Izin Usaha; atau</li> <li>c. pencabutan Izin Usaha.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 61</b></p> <p>Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait, masyarakat, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk:</p> <p class="list-item-l1">a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau</p> <p class="list-item-l1">b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>
	<b>Pasal 62</b>

	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b>  <b>KEWAJIBAN DAN LARANGAN</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Kewajiban</b>  <b>Pasal 63</b></p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;</li> <li>b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;</li> <li>d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;</li> <li>e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;</li> <li>f. menyediakan ruang terbuka hijau;</li> <li>g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;</li> <li>h. menyediakan toilet yang memadai;</li> <li>i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;</li> <li>j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;</li> <li>k. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;</li> <li>l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan</li> <li>m. mematuhi seluruh kewajiban berkenaan kegiatan usaha sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua          Larangan          Pasal 64</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:</p>

	<p>a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;</p> <p>b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;</p> <p>c. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;</p> <p>d. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli;</p> <p>e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang tercantum pada label;</p> <p>f. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;</p> <p>g. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan</p> <p>(2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, minimarket berstatus Waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut:</p> <p>a. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;</p> <p>b. makanan olahan segar; dan</p> <p>c. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.</p> <p>(3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b>  <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>  <b>Pasal 65</b></p> <p>Sejak 1 (satu) tahun Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang berstatus Waralaba wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b>  <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>  <b>Pasal 66</b></p> <p>Penggunaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan perjanjian sewa kontrak mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik</p>

	<p>hak guna, sehingga tunduk pada kewajiban, hak dan larangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b>  <b>KETENTUAN PENUTUP</b>  <b>Pasal 67</b>  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.</p>
	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal <b>BUPATI KAMPAR,</b></p> <p style="text-align: right;">AHMAD YUZAR</p> <p>Diundangkan di Bangkinang pada tanggal <b>SEKRETARIS DAERAH</b> <b>KABUPATEN KAMPAR,</b></p> <p style="text-align: center;">HAMBALI</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR ...  NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU:</p>	